

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat penting dalam pembangunan pertanian karena kemiskinan berkaitan erat dengan kesejahteraan hidup masyarakat. Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pengangguran, tingkat pendidikan, kualitas sumber daya manusia yang rendah dan sulitnya akses terhadap modal (Pattinama, 2009). Studi menunjukkan bahwa akses petani terhadap kredit atau sumber pembiayaan formal terbilang rendah. Menurut Bachtiar (2012), masyarakat kecil umumnya dianggap sebagai peminjam berisiko tinggi (*high-risk-borrowers*) oleh bank komersial karena sulit menilai ketaatan mereka dalam membayar kredit. Bank juga menganggap mereka tidak memiliki agunan untuk menjamin kredit dari risiko yang akan timbul. Bank memandang masyarakat miskin sebagai *uneconomic and small loan size clients* (tidak memiliki kemampuan ekonomi dan klien dengan ukuran pinjaman yang kecil), yaitu pihak yang tidak menarik dan tidak menguntungkan untuk didanai. Hal ini menjadi alasan sulitnya masyarakat kecil mengakses sumber kredit. Dengan adanya keuangan mikro (*microfinance*) menjadi salah satu upaya dalam mempermudah masyarakat untuk mengakses kredit.

Microfinance atau keuangan mikro merupakan salah satu instrumen ekonomi yang dapat menjadi alternatif dalam upaya mengatasi permasalahan perkonomian terutama masalah kemiskinan. Keuangan mikro atau *microfinace* mengacu pada jasa keuangan yang diberikan kepada pengusaha kecil atau bisnis kecil, yang biasanya tidak mempunyai akses perbankan terkait tingginya biaya transaksi yang dikenakan oleh institusi perbankan (Baskara 2013). *Microfinance* pada dasarnya mempunyai banyak layanan yang diperuntukkan bagi masyarakat dengan skala usaha menengah ke bawah. *Microfinancing* akan memberikan bantuan pinjaman melalui lembaga khusus, baik lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah maupun lembaga tertentu dalam bentuk perseroan atau koperasi. Secara umum, masyarakat banyak mengenal pembiayaan mikro dengan kredit mikro atau *micro credit*.

Menurut Bank Indonesia, definisi kredit mikro adalah kredit yang diberikan kepada pelaku usaha produktif baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyak seratus juta rupiah per tahun. Sedangkan, menurut Susila (2007) kredit mikro merupakan program pemberian kredit berjumlah kecil ke warga miskin untuk membiayai proyek yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan yang memungkinkan masyarakat miskin itu peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya. Baskara (2013) menjelaskan bahwa keuangan mikro adalah kegiatan sektor keuangan berupa penghimpunan dana dan pemberian pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro dengan suatu prosedur yang sederhana kepada masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. Kelembagaan keuangan mikro terus dikembangkan dalam upaya penguatan sektor perekonomian.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu komponen pelaku usaha yang memiliki peranan signifikan terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia, khususnya Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja serta pengentasan kemiskinan. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 4, UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia, peran usaha mikro terhadap perekonomian Indonesia yaitu memiliki kontribusi sebesar 61,97 dari total PDB nasional pada tahun 2020, menyerap tenaga kerja 97% dari daya serap dunia kerja, dan menyerap kredit terbesar pada tahun 2018 senilai kurang lebih 1 triliun (Lampiran 1). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah (Lampiran 2). Oleh sebab itu, keberadaan UMKM sangat dibutuhkan masyarakat khususnya masyarakat dengan kemampuan ekonomi dan keterampilan yang terbatas.

Sektor UMKM memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia pada masa krisis, di mana usaha mikro memiliki daya tahan menghadapi krisis ekonomi yang terjadi karena tidak banyak memiliki ketergantungan pada faktor eksternal seperti hutang dalam valuta asing dan bahan baku impor dalam melakukan kegiatan operasionalnya (Malik,2008). Bertahannya

UMKM dalam menghadapi krisis memberikan gambaran bahwa sektor ini mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan melalui suatu kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat pula. Di balik kontribusi UMKM yang cukup baik terhadap perekonomian nasional, ternyata sektor ini masih menyimpan permasalahan yang sangat mendasar. UMKM masih lemah dalam kemampuan manajemen usaha, kualitas sumber daya manusia yang masih terbatas, serta lemahnya akses ke lembaga keuangan, khususnya perbankan (Adiningsih, 2001)

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan UMKM, dalam hal modal kerja, pemerintah meluncurkan program pembiayaan bagi UMKM dan koperasi. Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah yang diikuti dengan nota kesepakatan bersama antara departemen teknis, perbankan, dan perusahaan penjamin kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro kecil dan menengah. Pada tanggal 5 November 2007, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan kredit bagi UMKM yaitu berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Hosen, 2014).

KUR adalah kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro kecil menengah koperasi dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah, namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Dengan adanya program KUR, pemerintah mengharapkan adanya akselerasi atau percepatan pengembangan kegiatan perekonomian terutama di sektor riil, dalam rangka penanggulangan atau pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja (Retnadi, Djoko. 2008).

Salah satu bank yang dipercaya oleh pemerintah menyalurkan KUR adalah PT. Bank Nagari yang merupakan Bank Pembangunan Daerah milik Sumatera Barat yang cabangnya tersebar di beberapa wilayah Sumatera Barat. Berdasarkan informasi dari Direktur Utama Bank Nagari, pada tahun 2023 Bank nagari mendapat alokasi plafon KUR dari pemerintah sebesar Rp2,5 triliun. KUR oleh Bank Nagari ditujukan untuk individu atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif seluruh sektor ekonomi yang digunakan untuk

pembelian/pengadaan barang modal, seperti pembangunan/pembelian tempat usaha, pembelian mesin/peralatan kerja/kendaraan, pembelian/pengadaan sarana produksi dan lain-lain yang termasuk kriteria investasi dan untuk tambahan modal kerja usaha, seperti penambahan persediaan barang dagang, kebutuhan biaya untuk operasional usaha, pembelian/pengadaan bahan mentah atau bahan baku usaha, dan lain-lain yang termasuk kriteria modal kerja.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti melihat penelitian ini penting dilakukan untuk melihat bagaimana dampak penggunaan kredit usaha rakyat dalam perkembangan usaha dan mengamati apakah ada perbedaan faktor produksi, jumlah produksi dan jangkauan pasar ketika sebelum dan setelah usaha memanfaatkan KUR.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pengembangan usaha mikro saat ini adalah akses permodalan karena sulitnya mendapatkan modal kerja dan investasi dari lembaga keuangan. Modal adalah hal yang sangat penting untuk keperluan suatu bisnis baik itu dalam skala kecil, menengah maupun besar. Modal merupakan sejumlah dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha untuk menghasilkan suatu produk serta mendapatkan keuntungan. Modal dalam suatu bisnis dapat berasal dari modal sendiri dan modal dari luar seperti meminjam dari bank.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah usaha mikro yang ada di Kota Padang Panjang mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun 2016 sampai tahun 2019, jumlah usaha tertinggi terdapat pada tahun 2019 yaitu mencapai 14.109 unit usaha (Lampiran 3). Upaya yang dilakukan pemerintah kota untuk membantu usaha mikro yaitu dengan meningkatkan plafon penyaluran KUR kepada para pelaku usaha. Program KUR ini disalurkan melalui bank dengan bunga yang ditawarkan cukup rendah yaitu mulai dari 6% per tahun.

Salah satu usaha mikro di Kota Padang Panjang yang memanfaatkan dana KUR untuk mengembangkan usahanya yaitu Usaha Keripik Talas Dessy (Lampiran 4). Usaha ini bergerak di bidang makanan ringan atau yang lebih dikenal dengan aneka keripik oleh-oleh khas Sumatera Barat. Usaha Keripik Talas Dessy yang

berlokasi di Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur ini menawarkan produk dengan bahan baku utama berupa talas yang diolah menjadi berbagai macam keripik diantaranya keripik talas balado, keripik talas kuning dan serundeng talas. Keripik Talas Dessy memiliki ciri khas rasa yang unik, produk yang ditawarkan berkualitas dan memiliki posisi unggul tersendiri dibandingkan usaha-usaha sejenis. Merek dagang Keripik Talas Dessy mulai dikenal banyak orang hingga berbagai luar daerah Sumatera Barat. Pemasaran produk sudah dilakukan di pasar Padang Panjang, Bukittinggi, dan Padang serta melalui media online seperti *shopee*, dan *instagram* (Lampiran 5).

Berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan di lapangan melalui wawancara terhadap pemilik usaha, permintaan terhadap produk Keripik Talas Dessy cukup tinggi namun usaha belum mampu memenuhi permintaan pasar (Lampiran 6). Pada tahun 2020 permintaan rata-rata pedagang pengecer terhadap produk Keripik Talas Dessy perbulan mencapai 600 kg. Namun, usaha ini hanya mampu memproduksi keripik talas sebanyak 480kg. Dalam periode tahun 2017-2020 produksi Keripik Talas Dessy tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Usaha ini mengalami kendala dalam meningkatkan volume produksi disebabkan keterbatasan modal dalam mengembangkan usahanya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, usaha ini melakukan pengajuan KUR ke Bank Nagari Cabang Padang Panjang. Jumlah KUR yang diajukan oleh pemilik usaha pada tahun 2020 ke Bank Nagari Cabang Padang Panjang yaitu Rp20.000.000 yang kemudian direalisasikan sejumlah Rp20.000.000 dengan jangka waktu angsuran selama satu tahun. KUR yang diperoleh dimanfaatkan sebagai tambahan modal untuk kegiatan produksi keripik talas yaitu persediaan bahan baku dan sewa toko. Usaha Keripik Talas Dessy ini baru memulai peminjaman KUR pada tahun 2020 karena pemilik usaha ingin mengembangkan usahanya dengan menambah *outlet* baru dan membeli mesin untuk produksi agar proses produksi dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Setelah memanfaatkan dana KUR sebagai tambahan modal usaha, pada tahun 2021 usaha ini mulai mengalami peningkatan produksi menjadi 30.345 kg dan pada tahun 2022 menjadi 35.850 kg (Lampiran 7).

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dampak yang ditimbulkan dari adanya kredit usaha rakyat terhadap perkembangan usaha mikro Keripik Talas Dessy dianggap penting untuk diteliti. Adapun pertanyaan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana profil usaha Usaha Keripik Talas Dessy dan profil kredit usaha rakyat yang diperoleh serta tahapan pengajuan KUR untuk usaha?
2. Apakah ada perbedaan faktor produksi, jumlah produksi, keuntungan dan jangkauan pasar Usaha Keripik Talas Dessy sebelum dan sesudah menggunakan kredit usaha rakyat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mendeskripsikan profil usaha, profil KUR dan tahapan pengajuan KUR yang diperoleh Usaha Keripik Talas Dessy
2. Menganalisis dampak penggunaan KUR terhadap faktor produksi, jumlah produksi, keuntungan, dan jangkauan pasar Usaha Keripik Talas Dessy.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembaca, yaitu:

1. Kalangan Akademisi, dalam mengkaji dampak pemberian kredit mikro dalam memberdayakan UMKM.
2. Pemerintah, dalam menjalankan pengawasan terkait dengan pelaksanaan kredit mikro.
3. Kalangan non-akademisi dan masyarakat luas, dapat menjadi sumber pengetahuan dan bisa bermanfaat dalam penerapan Kredit Usaha Rakyat sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakat khususnya UMKM.